



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024



DEDDY ABDUL HAMID
WAKIL BUPATI



H. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si
BUPATI



MARZANSIUS A.OHY, S.STP., M.AP
SEKRETARIS DAERAH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 telah diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Peningkatan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantive merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sertamen ciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kinerja pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercapai berkat kolaborasi dan dedikasi semua pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah daerah. Kerjasama ini meliputi perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan.

Sebagian besar target indikator kinerja utama yang menjadi indikator kinerja daerah tahun 2024 ini telah tercapai dan diraih namun demikian kami masih harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bolaang Uki, 14 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN REVIUW INSPEKTORAT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH	1
C. KONDISI MAKRO PEMERINTAH DAERAH	6
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
E. PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RPJMD 2021-2026	11
B. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA	8
B. ANALIS CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	60
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan -----	3
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur 2024 -----	4
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024-----	5
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 2024---	5
Tabel 1.5.	Indikator Makro Tahun 2024 -----	6
Tabel 1.6.	Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan tahun 2024-----	11
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis -----	15
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja 2024-----	17
Tabel 3.1.	Interval Nilai Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017-----	19
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 -----	19
Tabel 3.3.	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah-----	21
Tabel 3.4.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan social dan perekonomian daerah-----	27
Tabel 3.5.	Perhitungan Indeks Aksesibilitas Jalan Daopeyago-----	29
Tabel 3.6.	Sebaran Jangkauan TIK -----	30
Tabel 3.7.	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa -----	32
Tabel 3.8.	Daftar Desa Maju -----	33
Tabel 3.9.	Daftar Desa Mandiri-----	35
Tabel 3.10.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan -----	37
Tabel 3.11.	Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup -----	40
Tabel 3.12.	Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Ketahanan Pangan Daerah dan Penurunan PMS -----	41
Tabel 3.13.	Ketersediaan Pangan Daerah -----	44
Tabel 3.14.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Publik-----	47
Tabel 3.15.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga-----	52
Tabel 3.16.	Pengelompokkan Pendapatan Tahun 2024-----	60
Tabel 3.17.	Pengelompokkan Belanja Daerah Tahun 2024 -----	62

Tabel 3.18. Matriks Capaian Indikator Kinerja Serta Program

Pendukung ----- 63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan -----	3
Grafik 3.1.	Perkembangan Desa Jangkauan TIK-----	31
Grafik 3.2.	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja-----	48
Grafik 3.3.	Perkembangan Hasil Survey Masyarakat-----	50
Grafik 3.4.	Perbandingan Indeks Pendidikan-----	54
Grafik 3.5.	Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup-----	55
Grafik 3.6.	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender-----	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta BolaangMongondow Selatan----- 2



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan Desa Toluaya, Kec. Bolaang Uki

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kabupaten BolaangMongondow Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bolaang Uki, 14 Maret 2024

INSPEKTUR,



Drs. RIDEL D. PAPUTUNGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660720 199003 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa terdapat beberapa Azas Umum dalam Penyelenggaraan Negara, yaitu: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten / kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026, Rencana Kerja tahun 2024, Perjanjian Kinerja 2024 serta Dokumen Penggunaan Anggaran 2024.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

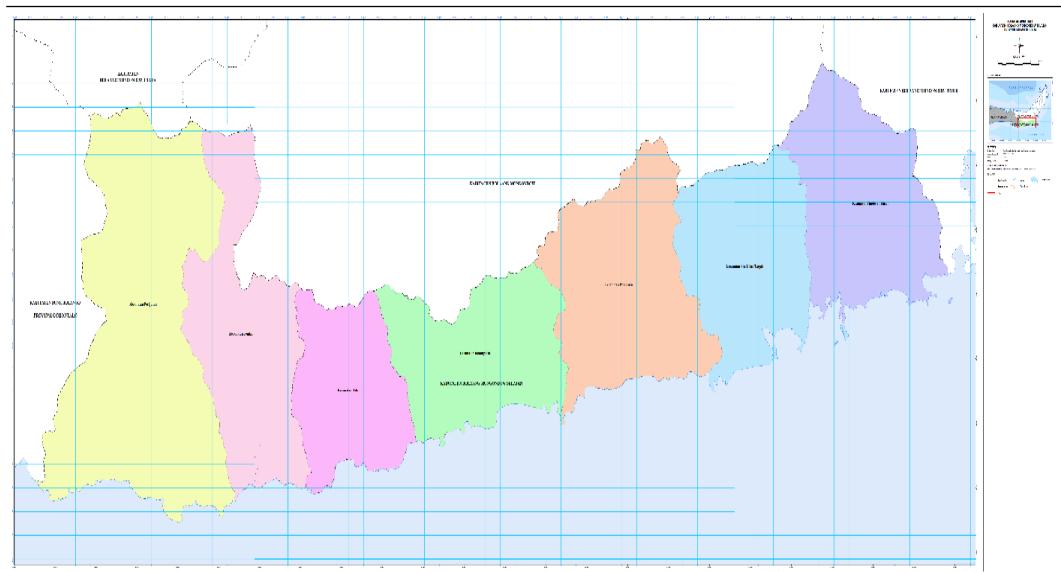
1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.932,30 km² dengan wilayah laut 1.881,60 km² dan

panjang garis pantai 294 km, merupakan bagian dari Sulawesi Utara yang berjarak \pm 255,32 km dari Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi salah satu wilayah terluar Sulawesi Utara karena berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terbagi dalam 7 kecamatan dengan kecamatan Posigadan merupakan wilayah terluas yang mencapai 27,72 persen dari total luas wilayah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara astronomis terletak antara $00^{\circ}25' 545''$ Lintang Utara dan $123^{\circ}28' 59,2''$ Bujur Timur, dengan ketinggian sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut.

Gambar 1.1. Peta Bolaang Mongondow Selatan



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda

Batas Geografis

- Sebelah Utara : Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Pemerintahan

- Kecamatan : 7 Kecamatan
- Desa : 81 Desa
- Jumlah Dusun : 266 Dusun
- Rukun Tetangga : 532 RT
- Jumlah Penduduk : 75.374 jiwa
- Jumlah PNS : 1813 jiwa

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan :

- Molibagu – Posigadan : 70 km
- Molibagu – Tomini : 43 km
- Molibagu – Helumo : 23 km
- Molibagu – Bolaang Uki : 0 km
- Molibagu – Pinolosian : 17 km
- Molibagu – Pinolosian Tengah : 37 km
- Molibagu – Pinolosian Timur : 68 km

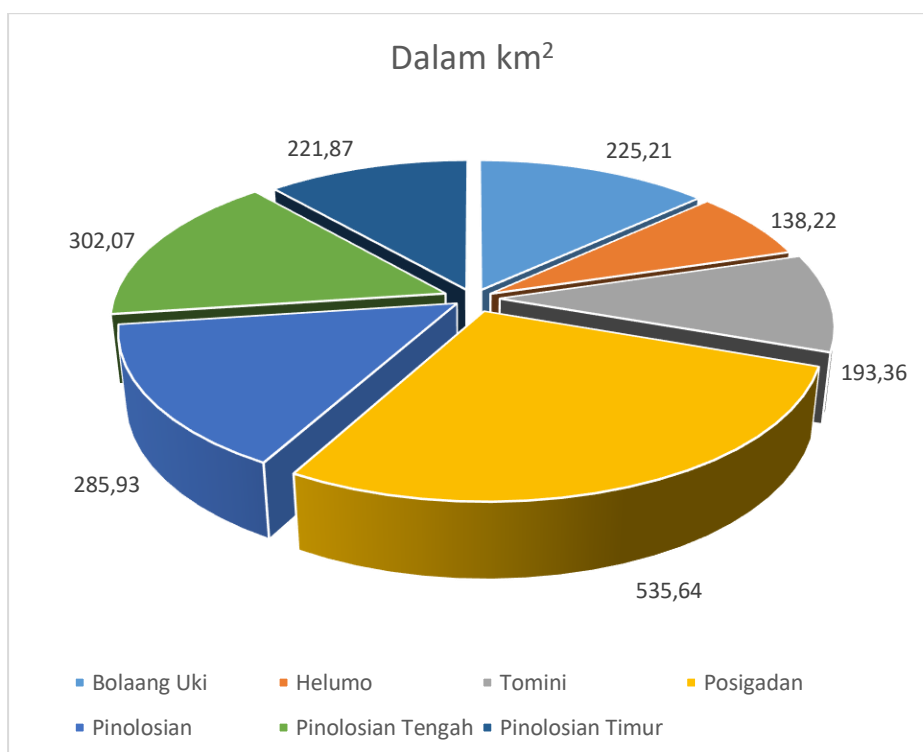
Sedangkan Cakupan luas daerah menurut kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Luas wilayah menurut kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bolaang Uki	255,21	13,21
2	Helumo	138,22	7,15
3	Tomini	193,36	10,01
4	Posigadan	535,64	27,72
5	Pinolosian	285,93	14,80
6	Pinolosian Tengah	302,07	15,63
7	Pinolosian Timur	221,87	11,48
Jumlah		1.932,30	100,00

Sumber :DDA BolaangMongondow Selatan Tahun 2024

Grafik 1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan



Sumber : DDA Kab. BolaangMongondow Selatan Tahun 2024

2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Jika dihubungkan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 mencapai 75.374 jiwa. tingkat kepadatan penduduk rata-rata 39,01 jiwa/km² dari luas wilayah 1.932,30 km².

Tabel 1.2.
Penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2024

KelompokUmur	Jumlah Penduduk			Persentase
	L	P	Jumlah	
0-4 tahun	2.511	2.337	4.848	6,4
9-13 tahun	3.496	3.310	6.806	9,0
14-18 tahun	3.440	3.301	6.741	8,9
15-19 tahun	3.776	3.500	7.276	9,7
20-24 tahun	3.791	3.697	7.488	9,9
25-29 tahun	3.250	3.035	6.285	8,3
30-34 tahun	3.180	2.940	6.120	8,1
35-39 tahun	2.565	2.354	4.919	6,5
40-44 tahun	2.816	2.534	5.330	7,1
45-49 tahun	2.714	2.547	5.261	7,0
50-54 tahun	2.310	2.076	4.386	5,8
55-59 tahun	1.785	1.549	3.334	4,4
60-64 tahun	1.250	1.198	2.448	3,2
65-69 tahun	947	873	1.820	2,4
70-74 tahun	586	566	1.152	1,5
> 75 tahun	574	566	1.140	1,5
Jumlah	38.991	36.383	75.374	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data di kependudukan diatas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki sebuah bonus demografi, dimana usia produktif (15-64 Tahun) lebih banyak dibanding penduduk usia non produktif yaitu dengan perbandingan 52.864 jiwa usia produktif dibanding 22.507 jiwa usia non produktif atau dengan perhitungan ratio ketergantungan sebesar 42,57%, dengan artian 100 jiwa orang produktif menanggung 42 jiwa yang tidak produktif.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk terbanyak adalah berada di kecamatan Bolaang Uki dengan jumlah penduduk sebanyak 18.746 jiwa terdiri dari 9.152 perempuan dan 9.594 jiwa laki-laki dengan kepadatan penduduk sebesar 24,87 %. Untuk jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 1.3

Jumlah Penduduk menurut jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas (KM ²)	Jumlah Penduduk			Kepadatan
		L	P	Jumlah	
Bolaang Uki	255,21	9.594	9.152	18.746	24,87
Posigadan	535,64	8.174	7.717	15.906	21,02
Pinolosian	285,93	6.023	5.550	11.573	15,35
Pinolosian Tengah	302,07	3.619	3.252	6.871	9,12
Pinolosian Timur	221,87	4.381	3.954	8.335	11,06
Helumo	138,22	3.905	3.588	7.493	9,94
Tomini	193,36	3.290	3.160	6.450	8,56
Jumlah		38.991	36.383	75.374	100

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan SD/Sederajat yaitu sebesar 20.937 jiwa atau 27,78% dari jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sebesar 75.374 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
Belum / Tidak Sekolah	14.125	
Tidak Tamat SD	10.624	
SD / Sederajat	20.937	
SLTP / Sederajat	12.357	
SLTA / Sederajat	13.170	
Diploma I/Diploma II	215	
Diploma III	702	
Diploma IV / Strata I	3.142	
Strata II	99	
Strata III	3	
Jumlah	75.374	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. KONDISI MAKRO KABUPATEN

Kondisi makro Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5.
Indikator Makro Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,40	66,79	69,92
2	Persentase Penduduk Miskin	%	12,04	11,40 – 10,56	11,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,55	3,76 – 3,38	2,51
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	5,50 – 6,98	5,28
5	PDRB per kapita	Rp.	37.824.776,00	32.814.049,53	40.800,573,00
6	Indeks Gini	Poin	0,31	0,33 – 0,31	0,296

* Sumber: bolsel.bps.go.id., dan sulut.bps.go.id

Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,28 persen mengalami penurunan sebesar 0,05 persen dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 5,33 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kab. Bolaang Mongondow Selatan dipengaruhi oleh factor pendorong di sector pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan dan infrastuktur.

Indeks Pembangunan Manusia yang tumbuh sebesar 0,75 poin menjadi 69,92 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 69,17. Indikator makro Kabupaten mencatat jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 8.280 jiwa tahun 2023 atau 12,04 menjadi 7,880 jiwa atau 11,33 % di tahun 2024 menurut rilis data BPS.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B, yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tipe A, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan tipe B, yang melaksanakan urusan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A, yang melaksanakan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sum urusan kebakaran;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- j. Dinas Sosial merupakan tipe B yang melaksanakan urusan bidang sosial;
 - k. Dinas Pertanian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan sub bidang statistik;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan sub bidang kehutanan;
 - p. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - r. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - s. Dinas Perikanan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - t. Dinas Perpustakaan merupakan Dinas tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan Dinas tipe A, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Tipe A, yang

- melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe A, melaksanakan fungsi urusan penunjang bidang penanggulangan bencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang politik dan wawasan kebangsaan;
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Bolaang Uki, merupakan Kecamatan tipe A;
 - b. Kecamatan Helumo, merupakan Kecamatan tipe A;
 - c. Kecamatan Tomini, merupakan Kecamatan tipe A;
 - d. Kecamatan Posigadan, merupakan Kecamatan tipe A;
 - e. Kecamatan Pinolosian, merupakan Kecamatan tipe A;
 - f. Kecamatan Pinolosian Tengah, merupakan Kecamatan tipe A; dan
 - g. Kecamatan Pinolosian Timur, merupakan Kecamatan tipe A.

E. PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan database Aparatur Sipil Negara tahun 2024 sebanyak 1.813 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 686 orang atau 37,84 % dan perempuan sebanyak 1.127 orang atau 62,16 %, dengan rincian menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD Sederajat	3
2	SLTP Sederajat	1
3	SLTA / Sederajat	208
4	Diploma I, II dan III	362
5	Diploma IV / Strata 1	1158
6	Strata 2	81
7	Strata 3	0

* Sumber: BKPSDM Bolsel

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang kondisi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana pembangunan daerah serta perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan realisasi kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta realisasi anggaran yang mendukung tercapainya kinerja yang ditetapkan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2021-2026

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) 2005-2025, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang Berdasarkan Pancasila”

Penjabaran dari makna visi Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bersatu: Adalah semangat penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat. Bersatu juga mencerminkan motivasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam memfasilitasi hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya. Bersatunya pemerintah daerah, politisi, masyarakat dan elemen pemangku kepentingan lainnya ditunjukkan dari percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan Indeks reformasi birokrasi, terpelihara kerukunan antar umat beragama serta terjaganya ketenteraman dan ketertiban umum seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdaulat: adalah penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan bertanggungjawab dan berkuasa penuh untuk membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dilakukan dengan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur baik ekonomi dan sosial. Berdaulat diukur terpenuhinya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan kepuasan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan terhadap layanan infrastruktur serta meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa yang tercermin dari peningkatan Indeks Desa Membangun.

Mandiri: adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah. Memaksimalkan semua potensi keunggulan daerah yang dikelola lebih optimal, sehingga lebih produktif dan kontributif dalam mengurangi ketergantungan daerah. Produksi dan produktivitas daerah terus dioptimalkan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mandiri terukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dan pemerataan pendapatan, serta tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang baik.

Sejahtera: Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menurunkan angka kemiskinan, pengangguran serta penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing.

Berkepribadian: sebagai pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki keunggulan yang berbasis kearifan lokal dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati. Berkepribadian terukur dalam hal ini tercermin dari tingkat kerukunan umat beragama Dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2. Misi

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk visi pembangunan jangka menengah. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran misi yang dibawa oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, yaitu :

a. Meningkatkan Nilai-Nilai Religius Dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama Yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila;

Kerukunan antar umat beragama merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai pancasila. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui misi I (satu) ingin mendorong masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang semakin religius, toleran antar

sesama umat beragama. Selain peningkatan nilai-nilai religius, Bolaang Mongondow Selatan juga kaya akan tradisi dan budaya bersatu menjaga toleransi umat beragama.

Nilai-nilai religius juga akan termanifestasi dengan terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pemerintah Bolaang Mongondow Selatan, dengan mengedepankan kearifan lokal yang menjadi pemersatu *multiculture* masyarakat Bolaang Mongondow Selatan. Ketertiban dan keamanan di Bolaang Mongondow Selatan tercermin juga dari rasa aman terhadap bencana dengan meningkatkan ketangguhan daerah dan upaya menekan dampak bencana berbasis masyarakat padatingkat desa.

b. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat;

Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar desa, kecamatan, kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Melalui misi kedua ini dilaksanakan melalui perluasan infrastruktur dasar, penguatan infrastruktur desa dan ketahanan bencana, peningkatan konektivitas antar kecamatan serta perluasan teknologi dan komunikasi. Pembangunan kewilayahan yang berdaulat dititik beratkan pada peran kecamatan untuk mampu mewujudkan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar desa.

c. Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri Dan Berwawasan Lingkungan;

Potensi unggulan Bolaang Mongondow Selatan sangat besar untuk dikembangkan melalui pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk juga industri rumah tangga. Sektor pariwisata dan jasa terus didorong dengan kreativitas masyarakat untuk menjadikan Bolaang Mongondow Selatan menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui misi ketiga ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ingin merealisasikan komitmen penciptaan lapangan kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran

dengan tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, dan tetap menjaga ketahanan pangan, selain itu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diharapkan mampu mengendalikan angka kelahiran pada penduduk miskin dan rentan miskin.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi hijau yang berfokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dengan dampak sosial yang lebih baik, serta berkurangnya dampak buruk terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Bolaang Mongondow Selatan.

d. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Inovasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;

Salah satu wujud reformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui misi keempat ingin menjawab kebutuhan masyarakat melalui transformasi digital dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Transformasi digital tersebut dapat dimanfaatkan publik secara lebih efektif dalam upaya pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintah.

e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berbudaya Serta Berdaya Saing.

Misi 5 (lima) ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketahanan keluarga serta pembangunan budaya karakter masyarakat. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan sistem pendidikan bermutu guna memperteguh akhlak, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat.

Dengan demikian, akan terwujud sumber daya yang berkepribadian mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal. Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada pembangunan budaya dan karakter masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terpilih menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Mengacu pada visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	2	3	4
Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dan Bersatu Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama yang Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila	Mewujudkan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang semakin religius, toleran antar sesama umat beragama serta menjaga ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Angka Kriminalitas
			Indeks Risiko Bencana
			Indeks Gotong Royong
Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pembangunan infrasktruktur penunjang kegiatan sosial dan perekonomian daerah	Rasio Konektivitas
			Indeks Aksesibilitas Jalan
	Meningkatnya Pembangunan Wilayah dalam Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Jumlah Desa Maju
			Jumlah Desa Mandiri
Meningkatnya kapasitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, inklusif berbasis potensi unggulan dan berwawasan lingkungan yang	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor unggulan	Persentase kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
			Persentase usaha mikro naik kelas

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	2	3	4
	berdampak pada penurunan kemiskinan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup
		Menurunnya tingkat pengangguran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta ketahanan pangan daerah yang berdampak pada penurunan PMKS	Tingkat pengangguran terbuka
			Laju pertumbuhan penduduk
			Indeks ketahanan pangan
			Persentase penurunan PMKS
Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP
			Opini BPK terhadap LKPD
			Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian dan Berbudaya serta Berdaya Saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bolaang Mongondow Selatan yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	Indeks Pendidikan
			Angka Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting
			Indeks Pemberdayaan Gender
			Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender
			Kabupaten Layak Anak

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan komitmen dalam melaksanakan sasaran strategis pemerintah daerah yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen atas kinerja utama yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangan Gotong Royong dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	2,75
		Angka Kriminalitas (per 100.000 Penduduk)	300
		Indeks Resiko Bencana	148,25
		Indeks Gotong Royong	2.80
2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekonomian Daerah	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	2,90
		Ratio Konektivitas	30,46
		Indeks Aksesibilitas Jalan	20
		Cakupan Wilayah (Desa) yang tercover Jaringan	74,07
3	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7200
		Jumlah Desa Maju	34
		Jumlah Desa Mandiri	5
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,50 – 6,98
		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB	38,79
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,45
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,00
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran, dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan - Pangan Daerah yang berdampak pada Penurunan PMKS	Persentase Penduduk Miskin	11,40-10,56
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,48
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38
		Indeks Ketahanan Pangan	78,16
Persentase Penurunan PMKS	5,88		
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	73,00
		Nilai SAKIP	BB
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
8	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	Indeks Pembangunan Manusia	66,20 – 67,31
		Indeks Pendidikan	61,51
		Angka Harapan Hidup	66,35
		Pravelansi Stunting	5,80
		Indeks Pembangunan Gender	82,00
		Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Layak Anak	73,50 Pratama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja suatu organisasi atau individu dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan integritas, serta memberi dampak positif bagi pencapaian tujuan yang lebih besar. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara terukur dengan mengacu pada sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, serta disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

Laporan kinerja ini menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik, serta tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terciptanya *good governance*.

A. Capaian Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026.

Untuk memudahkan dalam interpretasi atas capaian indikator kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, digunakan skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel T-e.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Interval Nilai berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2024 sangat baik yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	2,85	2,6	91,23	Sangat Tinggi
		Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	300	358,21	119,40	Sangat Tinggi
		Indeks Risiko Bencana	148,25	140,27	94,62	Sangat Tinggi
		Indeks Gotong Royong	2,8	3,0	107,14	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekonomian Daerah	Ratio Konektivitas	30,46	37,5	123,11	Sangat Tinggi
		Indeks Aksesibilitas Jalan	20	20	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Wilayah (Desa) yang tercover Jaringan	74,07	77	103,96	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju	34	43	123,5	Sangat Tinggi
		Jumlah Desa Mandiri	5	33	660	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB	38,79	38,09	98,20	Sangat Tinggi
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,45	21,88	4862,22	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80	80,67	100,84	Sangat Tinggi
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,48	2,51	101,21	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,17	84,78	Tinggi
		Indeks Ketahanan Pangan	78,16	71,81	91,88	Sangat Tinggi
		Persentase Penurunan PMKS	5,88	28,72	488,44	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (66,11)	94,43	Sangat Tinggi
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	n.a	n.a	n.a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90,26	106,19%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga	Indeks Pendidikan	61,51	61,81	100,59%	Sangat Tinggi
		Angka Harapan Hidup	66,35	65,11	97,98%	Sangat Tinggi
		Pravelansi Stunting	5,80	1,96	33,8%	Sangat Rendah
		Indeks Pembangunan Gender	82,00	80,97	98,74%	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender	73,50	65,11	89%	Tinggi
		Kabupaten Layak Anak	Pratama	n.a	n.a	n.a

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis di atas, dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.3
Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama dan Semangat Gotong Royong Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Daerah

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kerukunan umat beragama	n.a	2,85	2,6	91,23
2	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	335,41	300	358,21	119,40%
3	Indeks Risiko Bencana	124,21	148,25	140,27	94,62%
4	Indeks Gotong Royong	3	2,8	3,0	107,14%
Rata-rata Capaian Kinerja					103,10%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata capaian indikator kerja utama menunjukkan hasil dengan capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Untuk itu, uraian setiap indikatornya dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kondisi kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan layak mendapatkan apresiasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama menjadi bukti nyata hal tersebut.

Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah Operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan sebagai wadah dialog dan koordinasi antar umat beragama dalam menyelesaikan permasalahan dan merumuskan program bersama. Kedua, Pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama dalam hal ini Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan multikultur kepada tokoh agama dan masyarakat. Ketiga, Pengelolaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yaitu Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial melalui berbagai kegiatan, seperti PISB (Pelaksanaan Ibadah Shubuh Bersama) dan dialog antarumat beragama.

Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan sikap toleransi, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama, yang merupakan hasil dari peningkatan kerukunan umat beragama. Hal ini menghasilkan dampak positif, seperti meningkatnya rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat

Pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun: Budaya damai dan gerakan hidup rukun menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang toleran dan harmonis.

Pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran: Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan memiliki pemahaman dan persepsi yang positif tentang perbedaan agama.

Pembangunan tiga tempat ibadah di kompleks perkantoran Panango, yaitu Masjid Amirul Mukminin, Gereja Oikumene, dan Pure, menjadi simbol kerukunan umat beragama di Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang ibadah yang nyaman bagi semua agama.

Bolaang Mongondow Selatan memberikan contoh nyata melalui upaya dan kondisi kerukunannya, yang dapat diikuti oleh daerah lain di Sulawesi Utara untuk membangun masyarakat yang toleran dan harmonis.

b. Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)

Perkembangan teknologi yang sangat signifikan mampu menciptakan proses urbanisasi dengan kondisi lingkungan masyarakat sehingga perlu melakukan adaptasi. Kesulitan dalam beradaptasi menyebabkan masyarakat merasa cemas dan kebingungan.

Dorongan untuk memenuhi kebutuhan materi secara berlebihan, serta keinginan untuk memiliki kekayaan dan harta yang mewah, tanpa disertai keterampilan yang memadai, dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ambisi dan kemampuan diri. Ketidaksesuaian inilah yang berpotensi mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Angka kriminalitas (*crime rate*) adalah jumlah kejahatan selama setahun yang terjadi di suatu wilayah, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dan dikalikan 100.000.

Semakin tinggi angka kejahatan menunjukkan semakin rendahnya keamanan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (<https://sulut.bps.go.id/>), tingkat kriminalitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 menunjukkan trend kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, tingkat kriminalitas tercatat sebanyak 358,21 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2023, tingkat kriminalitas mencapai 335,41 kasus per 100.000 penduduk. Terjadinya kenaikan ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja keras dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dari 270 kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2024, sebanyak 255 kasus berhasil diselesaikan, atau setara dengan 94,44%. Persentase penyelesaian kasus ini menunjukkan tingkat efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Terjadinya trend kenaikan tingkat kriminalitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi** yaitu sebesar 358,21 dibandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang sebesar 300 kasus per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya-upaya preventif harus terus dioptimalkan.

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kriminalitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- 1) Peningkatan intensitas patroli dan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki potensi untuk memberikan efek deteren terhadap para pelaku tindak kriminal, serta secara signifikan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat secara luas.
- 2) Penguatan program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan solusi bagi permasalahan sosial dan ekonomi yang menjadi akar permasalahan kriminalitas.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dicapai melalui upaya

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam mendukung tugas aparat penegak hukum.

Upaya untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Bolsel perlu terus dilakukan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu terus bersinergi dan meningkatkan upaya-upaya preventif dan represif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

c. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (**IRB**) merupakan alat penting untuk mengukur dan memetakan tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Informasi yang dihasilkan dari IRB dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Pengkajian IRB dilakukan dengan menghitung tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. **Komponen bahaya** mengacu pada potensi terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. **Komponen kerentanan** mengacu pada kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memperparah dampak bencana. **Komponen kapasitas** mengacu pada kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dan menangani bencana.

Berdasarkan hasil pengkajian, IRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 adalah 140,27, dengan capaian kinerja 94,62%, termasuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya IRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

1) Lokasi geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak di wilayah yang rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

2) Kondisi fisik

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki topografi yang berbukit dan bergelombang, dengan kondisi tanah yang labil, sehingga rentan terhadap tanah longsor.

3) Kondisi sosial ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga masyarakatnya lebih rentan terhadap dampak bencana.

Berdasarkan hasil pengkajian IRB, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

1) Penguatan mitigasi bencana

Pemerintah perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana, seperti pembangunan infrastruktur penahan bencana, penyuluhan kepada masyarakat, dan simulasi tanggap bencana.

2) Peningkatan kapasitas masyarakat

Pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan menangani bencana, yang dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan tanggap bencana dan pembentukan desa tanggap bencana.

3) Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan

Untuk penanggulangan bencana yang lebih efektif, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, seperti pemerintah pusat pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat, dalam rangka penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Dengan mengoptimalkan upaya mitigasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, diharapkan risiko bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diminimalisasi.

d. Indeks Gotong Royong

Gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, merepresentasikan semangat kebersamaan, persatuan, dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi krusial dalam pembentukan kehidupan sosial yang harmonis dan resilien.

Indeks Gotong Royong merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai gotong royong. Pengukuran Indeks Gotong Royong dilakukan berdasarkan beberapa dimensi, antara lain:

- 1) Kebersamaan: Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama.
- 2) Persatuan: Tingkat toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan kelompok masyarakat.
- 3) Rela berkorban: Kesiediaan masyarakat untuk membantu orang lain tanpa pamrih.
- 4) Tolong menolong: Tingkat kepedulian dan bantuan sosial antar warga masyarakat.
- 5) Sosialisasi: Upaya pemerintah dalam menyebarkan nilai-nilai gotong royong kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, hasil pengukuran Indeks Gotong Royong di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh nilai 3, dengan capaian kinerja 107,14% dan kriteria **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai gotong royong masih terjaga dengan baik di masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya Indeks Gotong Royong di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- 1) Masih kuatnya budaya kekeluargaan dan solidaritas antar warga masyarakat;
- 2) Aktifnya kegiatan gotong royong di berbagai desa dan kelurahan;
- 3) Peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan gotong royong.

Meskipun Indeks Gotong Royong di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tergolong tinggi, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankannya, bahkan meningkatkannya. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai gotong royong, penguatan kelembagaan dan fasilitasi kegiatan gotong royong di tingkat desa dan kelurahan, serta pemberian apresiasi kepada individu dan kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

Nilai-nilai gotong royong merupakan modal sosial yang penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan harmonis.

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai gotong royong perlu terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat.

2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekonomian Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis di atas, dilakukan dengan menggunakan 3 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.4
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Sosial dan Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas	21,73	30,46	37,5	123,11%
2	Indeks Aksesibilitas Jalan	20	20	20	100%
3	Cakupan Wilayah (Desa) yang Tercover Jaringan	86,42	74,07	77	103,96%
Rata-rata Capaian Kinerja					109,02%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kerja utama yang ditetapkan menunjukkan bahwa ketiga indikator menunjukkan capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian dari setiap indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Rasio Konektivitas

Transportasi adalah sektor krusial dalam pembangunan daerah yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Jaringan transportasi yang terhubung dengan baik menjadi faktor utama dalam memperlancar mobilitas orang dan barang serta meningkatkan akses terhadap berbagai layanan publik.

Rasio konektivitas diukur dengan menghitung tingkat angkutan jalan dikalikan dengan bobot angkutan jalan. Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin baik tingkat keterhubungan antar wilayah dalam suatu daerah.

Pada tahun 2024, rasio konektivitas transportasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 37,5 poin, melampaui target kinerja tahun 2024 sebesar 30,46 poin dengan capaian kinerja 123,11% dan kriteria realisasi kinerja Sangat Tinggi.

Upaya berkelanjutan dan komprehensif dari pemerintah

daerah, yang didukung oleh masyarakat dan sektor swasta, sangat penting untuk meningkatkan rasio konektivitas transportasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan konektivitas yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Indeks Aksesibilitas Jalan

Tingkat aksesibilitas suatu wilayah kota/kabupaten dapat ditentukan berdasarkan matrix jarak tempuh terpendek antar kota/kabupaten pada wilayah propinsi tersebut. Menurut ketentuan Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan (1995), melalui matrix tersebut dapat ditentukan angka keterkaitan setiap wilayah kota/kabupaten, yang kemudian dicari rata-ratanya. Angka keterkaitan suatu kota/kabupaten yang lebih besar dari angka keterkaitan rata-rata, maka dapat dikatakan kota/kabupaten tersebut mempunyai aksesibilitas yang rendah. Kota/kabupaten yang rendah aksesibilitasnya, perlu ditingkatkan aksesibilitasnya melalui pembangunan jalan ke lokasi tersebut. Urutan prioritas pembangunan jalan didasarkan pada angka keterkaitan setiap kota/kabupaten, nilai angka keterkaitan yang besar akan mendapat prioritas pertama, demikian untuk prioritas selanjutnya.

Hasil perhitungan Indeks Aksesibilitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perhitungan Indeks Aksesibilitas Jalan Daopeyago

Kategori		Kriteria	Bobot
K (Kondisi Transportasi)	Aspal	B	5
F (Fungsi Transportasi)	Sekunder	B	4
T (Fungsi dan Jenis Pergerakan)	Lokal	B	4
D (Jarak i ke j)	1068 m Waktu tempuh 3 Menit	B	4
Hasil		(K*F*T/D)	20
Kategori			Baik

* sumber data : Dinas Perhubungan Kab. Bolsel

Berdasarkan tabel di atas, dari target kinerja sebesar 20 poin, capaian kinerja utama indeks aksesibilitas jalan tahun 2024 sebesar

20 poin sama dengan capaian pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Selain menggunakan cara tersebut di atas, metode pengukuran lainnya adalah dengan menghitung perbandingan antara panjang jalan total dengan luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian menentukan nilai akhir apakah nilai tersebut memenuhi standar persyaratan atau tidak. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perhitungan Indeks Aksesibilitas Jalan juga dapat dilakukan dengan menggunakan formula:

$$\text{Indeks Aksesibilitas} = \frac{\text{Panjang Jalan Total}}{\text{Luas Wilayah}}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Aksesibilitas} &= \frac{814,61}{1.932,30} \\ &= \mathbf{0,42} \end{aligned}$$

Tabel Analisis Pencapaian SPM Jaringan Jalan di Kab. Bolsel Untuk Indeks Aksesibilitas :

Luas Wilayah (km ²)	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (km/km ²)		M/TM
		Eksisting	Syarat	
1.932,30	814,61	0,42	>0,05	M

Keterangan :

M = Memenuhi

TM = Tidak Memenuhi

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, nilai Indeks Aksesibilitas Jalan secara keseluruhan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar **0,42** poin dengan kriteria **Memenuhi**.

c. Cakupan Wilayah (Desa) yang Tercover Jaringan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan penting dalam pembangunan di berbagai bidang. Untuk menciptakan masyarakat yang informatif dan kompetitif, jangkauan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus luas dan merata.

Cakupan jangkauan TIK diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki akses internet dan infrastruktur TIK lainnya.

Tabel 3.6
Sebaran Jangkauan TIK

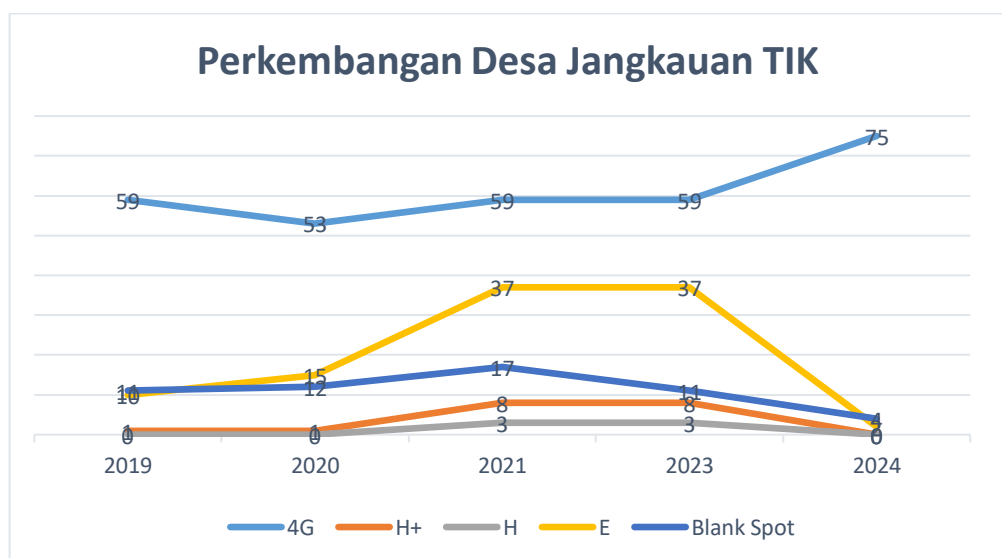
Kecamatan	Jumlah Desa					Jumlah
	Blank Spot	E	H	H+	4G	
Posigadan					16	16
Tomini					7	7
Helumo	3				8	11
Bolaang Uki					17	17
Pinolosian	1				9	10
Pinolosian Tengah		2			6	8
Pinolosian Timur					12	12
Jumlah	4	2	0	0	75	81

* Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2024, cakupan jangkauan TIK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 75 desa dari 81 desa. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya 70 desa.

Capaian Indikator Kinerja (IKU) TIK Bolsel pada tahun 2024 sebesar 75%. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 74,07 %. Realisasi IKU TIK Bolsel sebesar 101,26% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Grafik 3.1. Perkembangan Desa Jangkauan TIK



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Grafik diatas menunjukkan menggambarkan keberhasilan peningkatan jangkauan TIK (Jaringan Seluler) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024. Jumlah *blank spot* (titik tanpa

sinyal) mengalami penurunan dari 11 titik pada tahun 2023 menjadi 4 titik pada tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang informatif dan kompetitif dengan mengurangi jumlah *blank spot*. Untuk memastikan seluruh wilayah Bolsel terkoneksi jaringan TIK

Penurunan jumlah *blank spot* di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang informatif dan kompetitif. Upaya ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar seluruh wilayah di Bolsel dapat terkoneksi dengan jaringan TIK.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan cakupan jangkauan TIK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

- 1) Dalam rangka membangun infrastruktur TIK, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu membangun jaringan internet di desa-desa dan menyediakan fasilitas internet di sekolah dan kantor pemerintahan.
- 2) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya TIK telah meningkat. Hal ini terlihat dari semakin aktifnya mereka dalam menggunakan internet dan teknologi lainnya dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Operator telekomunikasi telah aktif berperan serta dalam menyediakan layanan TIK dengan memperluas jangkauan layanan internet di berbagai wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa tersebut di atas, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel 3.7
Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa Maju	44	34	43	123,5%
2	Jumlah Desa Mandiri	19	5	33	660 %
Rata-rata Capaian Kinerja					391,75%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) indikator kerja utama yang ditetapkan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **391,75%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Capaian dari setiap indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Desa Maju

Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

Tabel 3.8
Daftar Desa Maju

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA
1	2	3	4	5
1	7111012004	TANGAGAH	0,7484	MAJU
2	7111012005	SALONGO	0,803	MAJU
3	7111012009	TOLONDADU	0,7519	MAJU
4	7111012010	TABILAA	0,7465	MAJU
5	7111012012	SONDANA	0,7765	MAJU
6	7111012013	DUDEPO	0,7373	MAJU
7	7111012014	PINOLANTUNGAN	0,7162	MAJU
8	7111012015	TOLONDADU I	0,7094	MAJU
9	7111012027	SALONGO BARAT	0,7981	MAJU
10	7111012028	DUDEPO BARAT	0,7352	MAJU
11	7111022004	SAIBUAH	0,7741	MAJU
12	7111022006	LOWOO	0,7075	MAJU
13	7111022012	MANGGADAA	0,8087	MAJU
14	7111022017	MEYAMBANGA TIMUR	0,7667	MAJU
15	7111022023	INOSOTA	0,709	MAJU
16	7111032001	LINAWAN	0,714	MAJU
17	7111032004	KOMBOT	0,7213	MAJU
18	7111032005	LUNGKAP	0,7576	MAJU
19	7111032006	ILOMATA	0,7784	MAJU
20	7111032007	LINAWAN I	0,7211	MAJU
21	7111032007	TOLOTOYON	0,759	MAJU
22	7111032009	PINOLOSIAN SELATAN	0,224	MAJU
23	7111032010	KOMBOT TIMUR	0,7479	MAJU

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA
1	2	3	4	5
24	7111042002	ADOW	0,7254	MAJU
25	7111042004	TOBAYAGAN	0,719	MAJU
26	7111042006	ADOW SELATAN	0,8106	MAJU
27	7111042008	TOBAYAGAN SELATAN	0,7162	MAJU
28	7111052001	MOTANDOI	0,7087	MAJU
29	7111052004	DAYOW	0,73	MAJU
30	7111052006	MODISI	0,7352	MAJU
31	7111052007	POSILAGON	0,7503	MAJU
32	7111052008	PIDUNG	0,7576	MAJU
33	7111052010	MOTANDOI SELATAN	0,733	MAJU
34	7111052011	PERJUANGAN	0,7624	MAJU
35	7111052011	ONGGUNOI SELATAN	0,7797	MAJU
36	7111062001	BINIHA TIMUR	0,7132	MAJU
37	7111062003	BINIHA SELATAN	0,7441	MAJU
38	7111062004	DUMINANGA	0,7373	MAJU
39	7111062006	TRANS PATOA	0,759	MAJU
40	7111062007	BAKIDA	0,716	MAJU
41	7111062008	SINANDAKA	0,7661	MAJU
42	7111062009	SOPUTA	07187	MAJU
43	7111062011	MOTOLOHU	0,7076	MAJU

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdapat 43 desa yang dikategorikan sebagai desa maju atau desa pra-sembada di tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 44 desa. Penurunan ini terjadi karena 14 desa berubah status dari desa maju menjadi desa mandiri dan 13 desa dengan status berkembang berhasil naik kelas menjadi desa maju.

Penurunan jumlah desa maju di tahun 2024 dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, menunjukkan bahwa program pengembangan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya 33 desa yang berhasil mencapai status desa mandiri. Kedua, perlu dilakukan intervensi lebih lanjut terhadap 5 desa yang belum mencapai status desa maju. Walaupun terjadi penurunan jumlah desa maju, capaian kinerja pada indikator ini tergolong **Sangat Tinggi**, dengan realisasi 123,5% dibandingkan target 33 desa di tahun 2023. Capaian kinerja yang sangat tinggi menunjukkan bahwa program

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan status desa cukup efektif. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

b. Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155.

Tabel 3.9
Daftar Desa Mandiri

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA
1	2	3	4	5
1	7111012006	TOLUAYA	0,8356	MANDIRI
2	7111012007	MOLIBAGU	0,8541	MANDIRI
3	7111012008	POPODU	0,843	MANDIRI
4	7111012013	DUDEPO	0,8168	MANDIRI
5	7111012016	TOLONDADU II	0,8281	MANDIRI
6	7111012020	SOGUO	0,8835	MANDIRI
7	711101202	PINTADIA	0,8187	MANDIRI
8	7111022001	LION	0,8351	MANDIRI
9	7111022002	MOMALIA II	0,8178	MANDIRI
10	7111022003	MEYAMBANGA	0,8449	MANDIRI
11	7111022007	SINOMBAYUGA	0,8246	MANDIRI
12	7111022009	MOMALIA I	0,8994	MANDIRI
13	7111022013	PILOLAHUNGA	0,8394	MANDIRI
14	7111022014	TONALA	0,8335	MANDIRI
15	7111022016	ILOHELUMA	0,834	MANDIRI
16	7111022011	SAKTI	0,8633	MANDIRI
17	7111022022	MOMALIA III	0,8244	MANDIRI
18	7111032002	NUNUK	0,8352	MANDIRI
19	7111032003	PINOLOSIAN	0,8363	MANDIRI
20	7111042003	TOROSIK	0,8162	MANDIRI
21	7111052002	DUMAGIN A	0,8352	MANDIRI
22	7111052003	DUMAGIN B	0,8446	MANDIRI
23	7111052005	ONGGUNOI	0,8167	MANDIRI
24	7111062002	BINIHA	0,8206	MANDIRI
25	7111062005	HALABOLU	0,8268	MANDIRI

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA
1	2	3	4	5
26	7111062010	PANGIA	0,8167	MANDIRI
27	7111072001	BOTULIODU	0,8208	MANDIRI
28	7111072002	NUNUKA RAYA	0,8202	MANDIRI
29	7111072003	TOLUTU	0,8227	MANDIRI
30	7111072004	MILANGODAA	0,8602	MANDIRI
31	7111072005	MILANGODAA BARAT	0,8167	MANDIRI
32	7111072006	MILANGODAA UTARA	0,841	MANDIRI
33	7111072007	PAKUKU JAYA	0,8443	MANDIRI

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdapat 33 desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya memiliki 19 desa mandiri

Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pengembangan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan 33 desa mandiri desa atau sebesar 660% dari tahun 2023 dan realisasi kinerja yang **Sangat Tinggi** yaitu mencapai 783,5 % dibandingkan target 6 desa di tahun 2023.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian desa mandiri di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, antara lain:

- ✓ **Komitmen pemerintah daerah**
Pemerintah daerah bertekad untuk memperbaiki status desa-desa di wilayahnya. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan anggaran untuk pengembangan desa, penguatan program pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap aparatur desa.
- ✓ **Kerjasama antar stakeholder**
Terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat dalam upaya membangun desa. Partisipasi masyarakat
- ✓ **Partisipasi masyarakat**
Masyarakat desa aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Capaian desa mandiri di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa program pengembangan desa berjalan dengan baik dan efektif.

4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Unggulan tahun 2024 digunakan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.10
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing
Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	38,33	38,79	38,09	98,20
2	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	6,88	0,45	21,88	4.862,22
Rata-rata Capaian Kinerja					2.480,21%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditetapkan diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 2.480,21% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun uraian atas capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. **Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB**

Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PPK) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kontribusi sektor PPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi PDRB sektor PPK terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 sebesar 38,09%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,23 poin dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 38,33%.

Meskipun mengalami penurunan, capaian kontribusi PDRB sektor PPK pada tahun 2024 masih termasuk kategori **Sangat Tinggi**, yaitu sebesar 98,20% dari target yang ditetapkan sebesar 38,79%. Hal ini

menunjukkan bahwa sektor PPK masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kontribusi PDRB sektor PPK antara lain:

1) Penurunan produksi padi

Produksi padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 mengalami penurunan karena masih perlu dibangun dan diperbaikinya saluran irigasi primer, sekunder, tersier dan kuarter.

2) Penurunan hasil produksi perikanan

Berkurangnya kapal penangkap ikan dengan kapasitas diatas 10 *gross tonnage* (>10 GT) karena sudah tua dan rusak serta beberapa unit kapal penangkap ikan >10 GT yang melakukan aktifitas bongkar muat hasil perikanan pada sentra-sentra perikanan yang ada dengan kepemilikan pengusaha perikanan dari luar daerah telah kembali ke daerah asal. Hal tersebut cukup berimbas pada hasil produksi perikanan tangkap.

3) Penurunan luas area hutan.

Luas area hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan akibat alih fungsi hutan menjadi kawasan non-hutan.

Upaya untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor PPK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:

1) Meningkatkan produksi padi

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas benih, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta perbaikan sistem irigasi.

2) Meningkatkan hasil produksi perikanan

Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan kapal perikanan dan alat tangkap ikan serta sarana dan prasarana penunjang lain rumpon, bagan.

3) Menjaga kelestarian hutan

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi dan penghijauan kembali kawasan hutan yang telah terdegradasi.

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, sektor PPK masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor PPK perlu terus dilakukan agar sektor ini dapat terus berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digambarkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jaminan omzet maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdapat 1879 unit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang naik kelas dari usaha mikro pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase kenaikan sebesar 21,88%.

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang hanya 0,45%, capaian ini tergolong **Sangat Tinggi** dengan nilai 4862,22%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam meningkatkan kelas usaha mikro sangat efektif dan berhasil.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja yang tinggi ini, antara lain:

1) Kemudahan Pengurusan Izin Usaha

Proses izin usaha yang lebih mudah dan efisien di Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pelaku UMKM kini lebih termotivasi untuk melegalkan usaha mereka, membuka jalan menuju pertumbuhan yang lebih besar

2) Pembinaan dan Promosi

Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada usaha mikro. Pembinaan ini meliputi pelatihan, edukasi, dan fasilitasi akses pasar; memfasilitasi partisipasi usaha mikro dalam kegiatan promosi dan pameran dan memberikan mereka kesempatan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan penjualan.

3) Kemudahan Akses Modal

Kerja sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan perbankan memfasilitasi usaha mikro dalam memperoleh bantuan modal, yang berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan usaha.

4) Bantuan Peralatan Usaha

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja memberikan bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Bantuan ini mendorong usaha mikro untuk menjadi lebih kompetitif dan meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas.

5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mengukur kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yakni dengan mengukur kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara periodik.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024, setelah dilakukan perhitungan atas kualitas lingkungan hidup diperoleh data sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kriteria	Nilai
1	Indeks Kualitas Air	63,33
2	Indeks Kualitas Udara	93,04
3	Indeks Tutupan Lahan	87,54
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		80,67

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 **80,67** mengalami penurunan sebesar 6,45 poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024.

Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan, namun realisasi kinerja pada tahun 2024 masih tergolong **Sangat Tinggi** dengan capaian 100,64% dibandingkan target 80%. Hal

ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup masih cukup baik.

Beberapa faktor yang mendorong penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, antara lain:

1) Fasilitas penunjang kurang memadai

Pengendalian pencemaran lingkungan terhambat oleh kurangnya infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk pemantauan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi terbaru terkait pengelolaan lingkungan hidup

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang kompeten di bidang pengelolaan lingkungan hidup masih terbatas dan keterampilan dan pengetahuan SDM terkait pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan.

3) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk pengelolaan lingkungan hidup masih terbatas serta alokasi anggaran belum optimal untuk mendukung program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan IKLH.

6. Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Ketahanan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS

Untuk mengukur Indikator Kinerja Utama menurunnya tingkat pengangguran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta ketahanan pangan daerah untuk penurunan PMKS dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.12
Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Ketahanan Pangan Daerah untuk Penurunan PMKS

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,55	2,48	2,51	101,21%
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,12	1,38	1,17	84,78%
3	Indeks Ketahanan Pangan	72,88	78,16	71,81	91,88%
4	Persentase Penurunan PMKS	34,40	5,88	28,72	488,44%
Rata-rata Capaian Kinerja					191,58%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh capaian kinerja pada IKU menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan ketahanan pangan daerah serta untuk penurunan PMKS sebesar 488,44% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk Laju pertumbuhan penduduk capaian 84,78 dengan kategori tinggi, dan rata-rata capaian kinerja adalah 191,58 kategori **Sangat Tinggi**

Capaian atas indikator kinerja utama di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kelompok pengangguran terbuka adalah mereka yang: 1). Tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; 2). Tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; 3). Tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan 4). Sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data dari bps.sulut.go.id., Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran cukup efektif.

Meskipun TPT mengalami penurunan, namun realisasi kinerja masih tergolong **Sangat Tinggi** dengan capaian 100,4% (perhitungan terbalik) dibandingkan target terendah 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja dalam menurunkan TPT.

Beberapa faktor yang mendorong penurunan TPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, antara lain:

1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

2) Pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan

Pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat sehingga lebih siap kerja.

3) Penciptaan lapangan kerja

Pemerintah daerah dan sektor swasta menciptakan lapangan kerja baru melalui berbagai program dan kegiatan.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) membawa dampak positif, di antaranya peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas keamanan. Dengan pekerjaan, masyarakat memiliki penghasilan yang meningkatkan taraf hidup dan mengurangi risiko terlibat dalam tindak kriminal.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk ditandai dengan adanya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi kependudukan.

Pertumbuhan penduduk dihitung dengan menggunakan formula: **$P_t = P_o + (L - M)$** ., sedangkan untuk menghitung persentase laju pertumbuhan penduduk menggunakan formula **$\% = \{(L - M) / P_o\} \times 100\%$** . **Untuk** Keterangan formula: P_t = jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan; P_o = jumlah penduduk di tahun awal perhitungan; L = jumlah kelahiran; M = jumlah kematian; dan $\%$ = persentase pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dari 73.046 orang di tahun 2023 menjadi 75.374 orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,05 poin.

Meskipun laju pertumbuhan penduduk tergolong rendah, capaian kinerja pemerintah daerah masih tergolong **Tinggi** dengan nilai 84,78% dari target 1,38 poin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk cukup baik.

Guna mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat program Keluarga Berencana, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pengendalian pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut adalah tingginya angka kematian, penurunan tingkat kesuburan dan migrasi penduduk.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi

ketahanan pangan di suatu wilayah. Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

Indeks ketahanan pangan diukur menurut Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan Expert Judgement sesuai Indikator yang melingkupi tiga aspek ketahanan pangan yakni: 1). Ketersediaan; 2). Keterjangkauan; dan 3). Pemanfaatan pangan.

Berdasarkan indikator kinerja tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 71,81 poin. Capaian ini tergolong **Sangat Tinggi** dengan nilai 91,88% dari target 78,16 poin. Indeks ini menunjukkan gambaran ketersediaan dan cadangan pangan daerah yang cukup baik.

Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan gambaran ketersediaan dan cadangan pangan daerah, yang mana capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki ketahanan pangan yang cukup baik.

Capaian kinerja yang tinggi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain yaitu peningkatan infrastruktur pertanian dengan pembangunan irigasi dan jalan tani membantu meningkatkan produksi pertanian dan melalui program pemerintah seperti bantuan benih dan pupuk subsidi membantu petani meningkatkan hasil panen.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tingkat produksi pangan daerah di tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Ketersediaan Pangan Daerah

No	Jenis Komoditi	Jumlah Ton
1	Beras (Produksi Tahun 2023 Hasil Konversi padi Ke Beras	3280
2	Jagung	1976,4
3	Umbi Kayu	114,4
4.	Ubi Jalar	0
5.	Kacang Tanah	0,832
6.	Kacang Hijau	0,645

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Meskipun Indeks Ketahanan Pangan tinggi, terdapat penurunan tingkat produksi pangan di tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan pendampingan dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Meningkatkan peran **penyuluh pertanian di desa-desa** untuk membantu petani menerapkan inovasi.
2. Diversifikasi tanaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dengan mempromosikan **pangan lokal seperti sagu, singkong, dan sorgum**
3. Mengembangkan **benih unggul dan tahan hama** untuk meningkatkan produktivitas.
4. Memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan untuk mengurangi kehilangan hasil panen.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat terus meningkat dan terjaga di masa depan.

d. Persentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kondisi seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, jumlah PMKS di tahun 2024 sebanyak 12.163 jiwa, meningkat 1.202 jiwa dari tahun 2023.

Meskipun jumlah PMKS meningkat, capaian kinerja penanganan PMKS di tahun 2024 tergolong **Sangat Tinggi** dengan nilai 488,44% dari target 5,88%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang cukup baik dalam menangani PMKS.

Terdapat beberapa kendala dalam penanganan PMKS, antara lain database PMKS yang belum akurat yang disebabkan oleh validasi data penduduk miskin yang belum valid serta kurangnya jumlah dan kualitas petugas pendamping yang dapat menghambat penanganan PMKS.

Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peran tim verifikasi faktual sehingga memperoleh data PMKS yang akurat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelatihan dan pendampingan bagi petugas pendamping PMKS;
- 3) Membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan dunia usaha dalam penanganan PMKS;
- 4) Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang PMKS.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan jumlah PMKS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diminimalisir dan taraf hidup mereka dapat ditingkatkan.

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik

Mengukur Indikator Kinerja Utama meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik, digunakan 3 (tiga) indikator berikut:

Tabel 3.14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan
Kualitas Layanan Publik

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	B (65,61)	BB (70-80)	66,11	94,44%
2	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	n.a.	n.a
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,06	85	90,26	106,19%
Rata-rata Capaian Kinerja					66,88%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja sebesar 66,88%, dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang digunakan 2 indikator menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian kriteria **Sangat Tinggi** walaupun untuk indicator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 mengalami penurunan 0,8 poin menjadi 90,26 dari hasil tahun 2023 sebesar 91,06 dan 1 indikator kinerja tidak memiliki nilai yaitu Opini BPK terhadap LKPD karena proses pemeriksaan oleh BPK masih berlangsung sampai dengan saat laporan ini disusun.

Capaian atas indikator tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

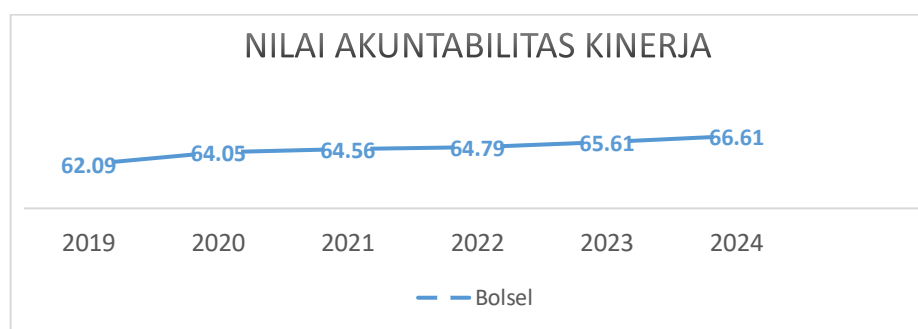
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja atas pelaporan SAKIP Tahun 2024 mendapatkan nilai 66,61 dengan predikat B.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan. Walaupun nilai SAKIP belum sesuai target BB (70-80), capaian kinerja mencapai 94,44%, yang tergolong **Sangat Tinggi**.

Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, predikat B dalam SAKIP menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kinerja yang tergolong baik dan berkomitmen kuat dalam mewujudkan *good governance*

Grafik 3.2.
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja



Sumber data : Bagian Organisasi Setda

Dari gambaran grafik diatas, nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan target untuk tahun 2024 ini adalah BB, kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Nilai Evaluasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang merupakan catatan tim evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek pendidikan: tingkat literasi penduduk, rata-rata lama sekolah, rasio guru/siswa, angka partisipasi sekolah, dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;

- 2) Aspek kesehatan: tingkat angka kematian ibu dan bayi, harapan hidup saat lahir, angka balita stunting, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dasar;
- 3) Aspek ekonomi: tingkat pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inekualitas pendapatan, dan kondisi sektor usaha;
- 4) Ketersediaan infrastruktur: akses masyarakat terhadap air bersih, listrik, jalan dan sanitasi yang layak;
- 5) Aspek lingkungan: kualitas lingkungan hidup seperti kualitas udara dan perairan, pengelolaan sampah, dan kerusakan lingkungan alam;
- 6) Tingkat partisipasi masyarakat: partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan akses terhadap teknologi informasi;
- 7) *Good governance*: kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatkan nilai pada komponen pelaporan SAKIP diantaranya:

- 1) Meningkatkan pemahaman SAKIP terutama pada level pimpinan PD dengan mendorong untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja;
- 2) Melakukan cascading kinerja terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026.
- 3) Melakukan perubahan RPJMD, Renstra dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, penyediaan buku pelajaran dan perpustakaan, serta peningkatan kompetensi guru.
- 5) Melaksanakan program nasional kesehatan dengan fokus pada ibu hamil dan balita, serta perbaikan fasilitas kesehatan dasar di pelosok daerah.
- 6) Membangun dan merehabilitasi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem air bersih serta listrik di daerah terpencil.
- 7) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui program bantuan sosial terpadu, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan kredit usaha mikro.
- 8) Menumbuhkembangkan sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi di daerah.

- 9) Membangun tempat pembuangan sampah secara terpadu dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.
- 10) Meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, ketersediaan data, dan peningkatan akuntabilitas aparatur pemerintah.
- 11) Mengoptimalkan pendanaan dari APBD maupun bantuan pusat untuk program-program perbaikan tata kelola dan peningkatan indeks pembangunan daerah.

b. Opini BPK Terhadap LKPD

Laporan keuangan merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari tata kelola keuangan yang baik, baik dalam sektor privat maupun publik. Dokumen ini menyajikan data-data fundamental terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas, yang diproses dan disajikan untuk memfasilitasi para pengguna dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya.

Secara khusus, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan tambahan, yaitu untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola. Akuntabilitas ini diukur melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, baik secara materialitas, posisi keuangan, maupun arus kas.

Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum diperoleh hingga saat ini. Tim audit BPK RI masih melakukan pemeriksaan hingga laporan ini disusun. Hal ini menunjukkan bahwa proses audit masih berlangsung dan belum ada kesimpulan mengenai kewajaran laporan keuangan.

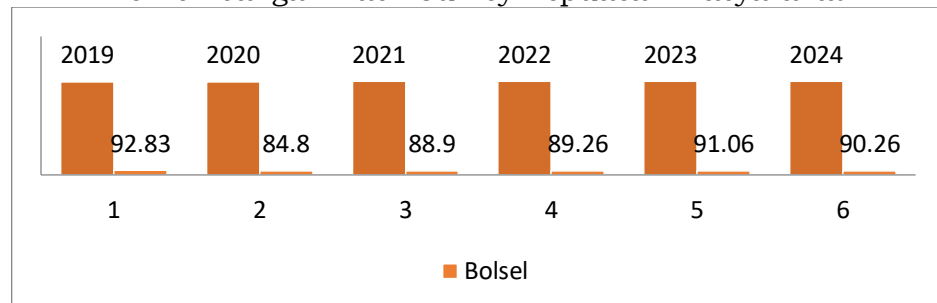
c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen pengukuran yang krusial dalam evaluasi efektivitas pelayanan publik. IKM diperoleh melalui analisis komparatif antara ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang diterima, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor 90,26 poin. Terjadi penurunan sebesar 0,8 poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 91,06 poin, namun capaian kinerja 106,19 **Sangat Tinggi** melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini

menunjukkan komitmen aparatur penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Grafik 3.3
Perkembangan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat



* Sumber data : Bagian Organisasi Setda

Grafik di atas menunjukkan tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang signifikan.

Berdasarkan data, capaian IKM telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, antara lain:

1) Komitmen Perangkat Daerah

Komitmen yang teguh dari perangkat daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik merupakan prasyarat utama dalam mencapai peningkatan IKM. Implementasi dari komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan terukur, seperti pengembangan kapasitas aparatur, perluasan jangkauan pelayanan, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas

2) Pendampingan Instansi Teknis

Instansi teknis berperan vital dalam meningkatkan IKM melalui dukungan dan pendampingan penyediaan administrasi dan fasilitas pelayanan publik, yang memastikan pelayanan sesuai standar. Dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh instansi teknis dalam penyediaan administrasi dan fasilitas pelayanan publik memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pendampingan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

3) Evaluasi Berkala

Evaluasi kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkala oleh Kemenpan RB melalui PEKPPP dan Ombudsman RI melalui Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik membantu

mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan.

4) Inovasi Pelayanan

Inovasi dalam pelayanan publik, seperti pembangunan Mal Pelayanan Publik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan. Hal ini meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

5) Digitalisasi Pelayanan

Implementasi digitalisasi dalam pelayanan perizinan, melalui platform daring, memfasilitasi aksesibilitas dan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat. Layanan perizinan daring memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan transparansi pelayanan publik

Meskipun capaian IKM tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

8. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga

Untuk mengukur sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat dan keberdayaan keluarga menggunakan 5 (lima) indikator berikut:

Tabel 3.15
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan,
Kesehatan Masyarakat dan Keberdayaan Keluarga

No	Indikator Kinerja	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan	61,35	61,51	61,87	100,59
2	Angka Usia Harapan Hidup	64,95	66,35	65,11	97,98
3	Prevalensi Stunting	2,97	5,80	1,96	33,8
4	Indeks Pembangunan Gender	80,42	82,00	80,97	98,74
5	Indeks Pemberdayaan Gender	62,98*	73,50	65,11	89%
6	Kabupaten Layak Anak	n.a	Pratama	n.a	n.a
Rata-rata Capaian Kinerja					53,55%

Berdasarkan tabel, dari 6 indikator kinerja utama (IKU), terdapat 1 IKU yang belum dapat diukur karena belum terlaksana, yaitu IKU Kabupaten Layak Anak. Dari 5 IKU lainnya, 3 IKU menunjukkan pencapaian Sangat Tinggi, yaitu Indeks Pendidikan, Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Gender.

Sedangkan IKU Prevalensi Stunting menunjukkan pencapaian Rendah dan Indeks pemberdayaan Gender pencapaian Tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata capaian IKU adalah 53,55% dengan kategori **Rendah**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah masih perlu dioptimalkan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Uraian setiap indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

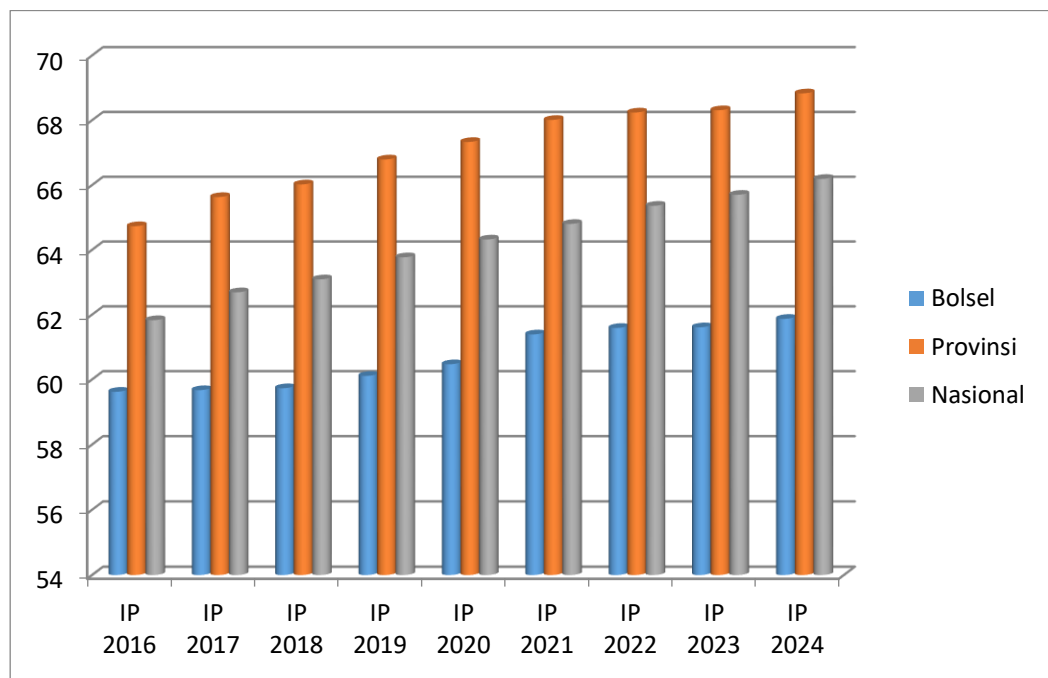
a. Indeks Pendidikan

Pendidikan berperan krusial dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan keterampilan guna mendorong pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan erat kaitannya dengan kualitas kesehatan individu. Usia harapan hidup yang lebih tinggi dapat memperbesar manfaat investasi dalam pendidikan

Indeks pendidikan mencerminkan hasil pembangunan pendidikan yang strategis, karena kualitas SDM di dalamnya sangat menentukan produktivitas bangsa. Kualitas SDM yang tercermin dalam indeks pendidikan sangat menentukan tingkat produktivitas, sehingga indeks ini memiliki kedudukan strategis sebagai pencerminan hasil pembangunan pendidikan. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Capaian kinerja pada indikator Indeks pendidikan sebesar 61,87 poin dimana . Dibandingkan dengan target sebesar 61,51 maka capaian indikator kinerja utama sebesar 100,59% dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Grafik 3.4.
Perbandingan Indeks Pendidikan



* Sumber data :bolselkab.bps.go.id

Berdasarkan data, terdapat tiga faktor utama yang mendukung peningkatan kinerja indeks pendidikan:

1) Penguatan Lembaga Pendidikan Nonformal

Lembaga Pendidikan Nonformal (LPNF), yang mencakup Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), memiliki peran krusial dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Upaya penguatan LPNF, melalui peningkatan kualitas program, sarana prasarana, dan kapasitas tenaga pengajar, akan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi masyarakat secara lebih luas

2) Pemberian Beasiswa

Pemerintah daerah memberikan berbagai beasiswa kepada siswa berprestasi, anak asuh pemda, dan siswa yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pendidikan akhir studi. Pemberian beasiswa ini dapat membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3) Kerjasama Orang Tua dan Sekolah

Kolaborasi yang harmonis antara orang tua dan sekolah berperan krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan dukungan serta motivasi

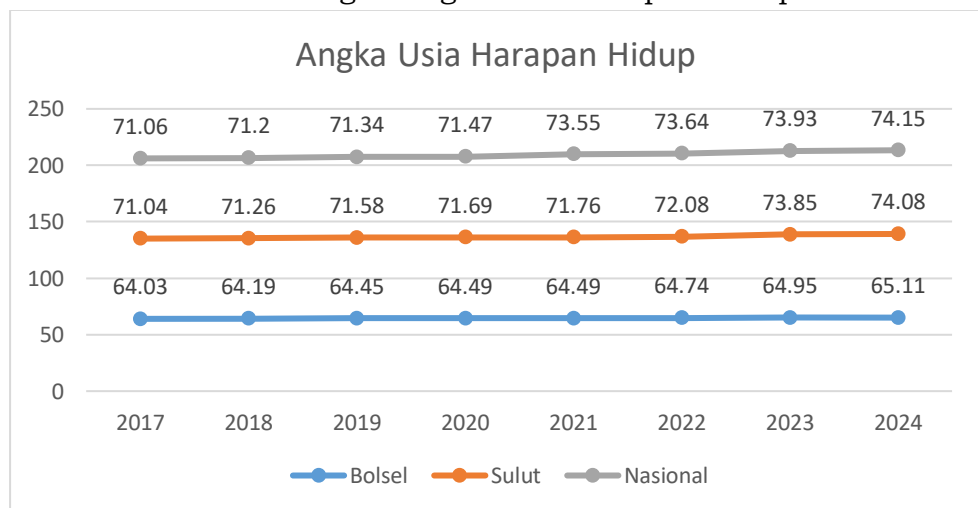
dalam proses belajar anak, sementara sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menyelenggarakan pengajaran yang berkualitas

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Kesehatan di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk pada saat lahir, dengan asumsi tingkat kematian dan kesuburan yang berlaku saat itu tidak berubah.

Berdasarkan data dari BPS, Angka Harapan Hidup di Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2024 mencapai 65,11 tahun. Capaian ini termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai 97,98% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 66,35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Bolaang Mongondow Selatan memiliki peluang hidup yang cukup panjang dan sehat.

Grafik 3.5.
Perbandingan Angka Usia Harapan Hidup



Sumber Data : bps.sulut.go.id dan bps.go.id

Meskipun grafik menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Bolaang Mongondow Selatan masih lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, beberapa indikator positif mengisyaratkan adanya potensi peningkatan daya saing di sektor kesehatan.

Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan merokok.

Kedua, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan semakin meningkat. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kesehatan serta upaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Ketiga, meningkatnya konsumsi makanan bergizi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk menjaga kesehatan.

Keempat, komitmen pemerintah daerah untuk mengikutsertakan masyarakat secara keseluruhan dalam program UHC (Universal Health Coverage) melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting, suatu kondisi kurang gizi kronis yang diakibatkan oleh asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu yang lama, merupakan indikator penting dalam penilaian kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok usia balita, karena berdampak pada gangguan pertumbuhan anak.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di tahun 2024, prevalensi stunting mencapai 1,96%. Capaian ini tergolong **Sangat Rendah** dengan nilai 33,8% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 5,80%.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian target prevalensi stunting di Bolaang Mongondow Selatan, antara lain:

- 1) Peningkatan gizi balita melalui posyandu, pendidikan gizi, dan suplemen zat gizi;
- 2) Pengayaan makanan pendamping ASI bagi balita usia 6-23 bulan;
- 3) Sosialisasi ASI eksklusif bagi Ibu Hamil dan Menyusui;
- 4) Kader posyandu lebih giat melakukan kunjungan dan deteksi dini stunting.

Kendatipun capaian target prevalensi stunting dikategorikan sangat rendah, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, di antaranya kondisi epidemi dan iklim ekonomi masyarakat yang belum kondusif, serta keterbatasan sarana fasilitas kesehatan di sejumlah desa.

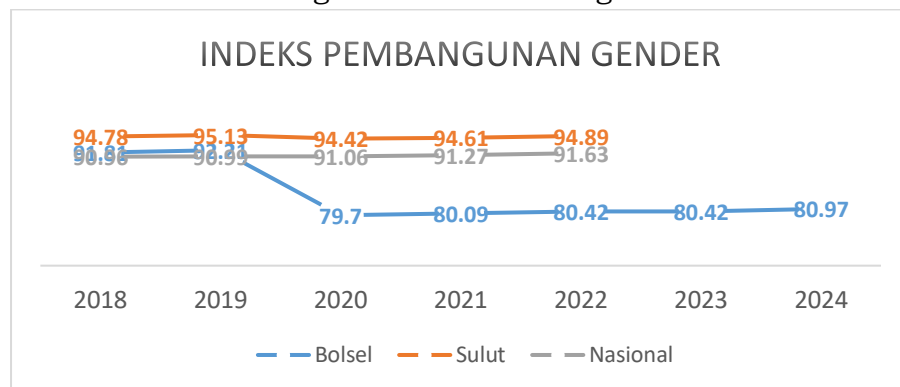
Untuk meningkatkan capaian target prevalensi stunting di masa depan, perlu dilakukan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Pemantauan gizi secara berkelanjutan dan tindak lanjut kasus stunting;
- 2) Koordinasi sektor terkait perlu ditingkatkan untuk sinergi optimal;
- 3) Peningkatan sarana penanggulangan stunting di fasilitas kesehatan primer.

d. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia perempuan dan laki-laki secara komprehensif.

Grafik 3.6.
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender



*sumber : sulut.bps.go.id dan bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 mencapai 80,97%.

Dibandingkan dengan target Indeks Pembangunan Gender 82% di tahun 2024, capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender Bolaang Mongondow Selatan sebesar 98,74% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan semakin kecil.

Beberapa faktor yang mendukung capaian target Indeks Pembangunan Gender di Bolaang Mongondow Selatan, antara lain:

- 1) Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan;
- 2) Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi;
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.

Meskipun capaian Indeks Pembangunan Gender tergolong Sangat Tinggi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- 1) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan;

- 2) Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
- 3) *Stereotype gender* yang masih ada di masyarakat.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender di masa depan, perlu dilakukan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- 2) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
- 3) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender.

e. Kabupaten Layak Anak

Pembentukan kegiatan Kabupaten Layak Anak bertujuan membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota layak anak adalah bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan anak dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun capaian indikator kinerja utama Kabupaten Layak Anak di tahun 2024 belum dapat diukur karena belum terlaksananya kegiatan Kabupaten Layak Anak secara resmi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- 1) Penyusunan Profil Anak Berkebutuhan Khusus untuk memahami kebutuhan dan kondisi anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat dirumuskan program dan intervensi yang tepat;
- 2) Peningkatan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak, termasuk korban kekerasan;
- 3) Pembentukan Kecamatan dan Desa Layak Anak dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di tingkat local;

- 4) Pengalokasian Anggaran yang cukup untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti belum terlaksananya kegiatan Kabupaten Layak Anak secara resmi dan belum adanya regulasi Kabupaten Layak Anak, optimisme tetap tinggi bahwa Kabupaten Layak Anak dapat terwujud di Bolaang Mongondow Selatan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan beberapa strategi, antara lain:

- 1) Percepatan regulasi Kabupaten Layak Anak

Diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak, sehingga program Kabupaten Layak Anak memiliki landasan hukum yang kuat.

- 2) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi

Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan program Kabupaten Layak Anak.

- 3) Peningkatan kapasitas SDM

Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, dalam memahami dan melaksanakan program Kabupaten Layak Anak.

- 4) Peningkatan alokasi anggaran

Diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk program Kabupaten Layak Anak, sehingga program Kabupaten Layak Anak dapat berjalan dengan optimal.

- 5) Monitoring dan evaluasi

Diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan program Kabupaten Layak Anak berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, ditetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2024 mengalami perubahan sebesar Rp. 639.329.112.828,00,-.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer** dan **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Pengelompokan Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH		%
	PENDAPATAN	REALISASI	
PENDAPATAN	639.329.112.828,00	629.230.216.390,11	98,42
PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.088.994.856,00	22.198.440.925,11	110,50
Pajak Daerah	4.750.287.502,00	6.073.470.873,00	127,85
Retribusi Daerah	10.449.422.400,00	11.273.645.225,00	107,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.020.357,00	640.020.357,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.249.264.597,00	4.211.304.470,11	99,11
PENDAPATAN TRANSFER	612.741.829.148,00	602.860.904.972,00	98,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.361.302.613,00	586.294.368.350,00	99,82
Dana Perimbangan	524.970.635.613,00	512.267.844.350,00	97,58
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	365.330.388.000,00	364.751.601.275,00	99,84
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.076.593.939,00	78.191.816.657,00	98,88
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	53.868.044.674,00	62.285.601.000,00	115,63
Dana Desa	62.390.667.000,00	61.905.121.000,00	99,22
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.380.526.535,00	16.566.536.622,00	65,27
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.495.453.315,00	4.038.346.407,00	73,49
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	6.498.288.824,00	4.170.870.493,00	64,18

2. Belanja Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026 menegaskan pentingnya pengaturan alokasi Belanja Daerah yang efisien, efektif, dan proporsional. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Penentuan Belanja Daerah melibatkan tiga elemen penting yaitu Masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari Belanja Daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan dan

penetapan anggaran. Kedua, Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, DPRD yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran.

Ketiga elemen tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling terkait dalam memastikan Belanja Daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pada tahun 2024, orientasi Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diarahkan pada beberapa prioritas utama, yaitu efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah, penurunan *prevalensi stunting*.

Selain prioritas utama tersebut, Belanja Daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, menjaga kondisi kesehatan dan mempertahankan ekonomi masyarakat dan menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, Belanja Daerah tahun 2024 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.17.

Pengelompokan Belanja Daerah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA	698.078.854.364,51	663.380.185.896,15	95,03
BELANJA OPERASI	489.870.178.801,73	460.186.691.486,15	93,94
Belanja Pegawai	243.650.092.253,45	225.670.587.199	92,62
Belanja Barang dan Jasa	195.577.295.643,00	184.114.256.265,15	94,14
Belanja Subsidi	696.600.000,00	696.600.000,00	100,00
Belanja Hibah	33.771.589.645,28	33.727.951.522,00	99,87
Belanja Bantuan Sosial	16.174.601.260,00	15.577.296.500,00	96,31
BELANJA MODAL	102.179.279.599,78	98.714.591.985,00	96,61
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.306.677.426,00	14.610.106.510,00	95,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.227.325.121,78	12.753.623.470,00	89,64
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.629.355.052,00	70.346.498.755,00	98,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.922.000,00	114.339.000,00	98,63
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	58,27
Belanja Tidak Terduga	2.852.134.000,00	1.661.945.000,00	58,27
BELANJA TRANSFER	103.177.261.963,00	102.816.957.425,00	99,65

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bagi Hasil	801.385.142,00	587.031.875,00	73,25
Belanja Bantuan Keuangan	102.375.876.821,00	102.229.925.550,00	99,86
SURPLUS / (DEFISIT)	(58.749.741.536,51)	(34.149.969.506,04)	58,13
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.749.741.536,51	58.749.741.536,51	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.570.594.736,51	45.570.594.736,51	100,00
Pencairan Dana Cadangan	13.179.146.800,00	13.179.146.800,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	58.749.741.536,51	58.749.741.536,51	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	24.599.772.030,47	

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah setiap program harus mendukung kinerja pemerintah daerah dan untuk mengukur hal tersebut, dapat dilihat dalam matriks tabel berikut :

Tabel 3.18.
Matriks Capaian Indikator Kinerja serta Program Pendukung

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Program			
		Target	Capaian	%	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Toleransi	2,85	2,6	91,23	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.702.045.470,00	1.617.313.262,00	95,02
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					25.782.414.724,00	25.760.993.548,00	99,92	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					2.773.313.000,00	2.624.476.497,00	94,63	
	Indeks Risiko Bencana	148,25	140,27	94,62	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	387.000.000,00	385.192.500,00	99,53
					Program Penanggulangan Bencana	480.376.000,00	415.767.400,00	86,55
	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	300	358,21	119,40	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.627.557.375,00	1.613.890.850,00	99,16
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	192.763.000,00	50.306.100,00	26,10
	Indeks Gotong Royong	2,8	3,0	107,14	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.650.000,00	0,00	0,00
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.702.045.470,00	1.617.313.262,00	95,02
	Rasio Konektivitas	30,46	37,5	123,11	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	827.516.500,00	810.301.200,00	97,92
	Indeks Aksesibilitas Jalan	20	20	100				
	Cakupan Wilayah (Desa) Yang Tercover Jaringan	74,07	77	103,96	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.590.492.000,00	2.589.867.800,00	99,98
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	700.202.900,00	690.329.663,00	98,59
					Program Penatagunaan Tanah	349.991.408,00	349.213.000,00	99,78
					Program Penataan Bangunan Gedung	2.738.612.350,00	2.545.665.293,00	92,95
	Jumlah Desa Maju	34	43	123,5	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	21.322.850,00	0,00	0,00
	Jumlah Desa Mandiri	5	33	660	Program Administrasi Pemerintahan Desa	233.300.375,00	196.867.700,00	84,38
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	39.678.490,00	21.115.338,00	53,22
	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	38,79	38,09	98,20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.316.387.255,00	2.313.138.506,00	99,86
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	41.740.000,00	41.673.500,00	99,84
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	43.674.000,00	27.137.000,00	62,14
					Program Penyuluhan Pertanian	470.384.785,00	461.493.500,00	98,11

Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,45	21,88	4862,22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	234.396.000,00	224.798.500,00	95,91
				Program Pengembangan UMKM	218.333.378,00	173.763.353,00	79,59
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	60.727.826,00	60.720.963,00	99,99
				Program Pegendalian Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	135.426.294,50	133.320.380,00	98,44
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	610.900,00	609.700,00	99,80
				Program Promosi Penanaman Modal	13.451.638,00	13.409.300,00	99,69
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	610.373.600,00	605.169.112,00	99,15
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	101.919.000,00	101.909.750,00	99,99
				Program Pengelolaan Persampahan	2.129.437.500,00	2.087.454.695,00	98,03
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,48	2,51	101,21	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	99.974.000,00	98.466.200,00	98,49
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	584.881.447,28	578.837.900,00	98,97
				Program Peningkatan Sarana DistribusiPerdagangan	435.797.100,00	346.083.800,00	79,41
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,17	84,78	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.760.689.976,00	2.681.925.500,00	97,15
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	810.300.000,00	749.385.000,00	92,48
				Program Pendaftaran Penduduk	389.392.920,00	389.266.500,00	99,97
Indeks Ketahanan Pangan	78,16	71,81	91,88	Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.771.306.849,00	1.764.823.458,00	99,63
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.229.800,00	13.229.800,00	100,00
Persentase Penurunan PMKS	5,88	28,72	488,44	Program Pemberdayaan Sosial	253.248.750,00	248.250.000,00	98,03
				Program Rehabilitasi Sosial	42.865.800,00	42.321.900,00	98,73
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	931.058.880,00	767.108.490,00	82,39
				Program Penanganan Bencana	480.376.000,00	415.767.400,00	86,55

Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (66,11)	94,43	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	370.471.246,00	362.263.100,00	97,78
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.890.415.354,00	1.804.183.901,00	95,44
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.680.777.173,00	3.677.758.050,00	99,92
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	432.735.859,00	422.166.200,00	97,56
Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	Na	na	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	109.455.592.696,00	107.430.991.152,00	98,15
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	939.168.662,00	781.254.284,00	83,19
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.018.989.000,00	928.729.295,00	91,14
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90,26	106,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	43.242.012.377,00	39.279.189.181,00	90,84
Indeks Pendidikan	61,51	61,81	100,59%	Program Pengembangan Kebudayaan	583.258.220,00	562.702.567,00	96,48
				Program Pengelolaan Arsip	86.405.000,00	80.495.434,00	93,16
Angka Usia Harapan Hidup	66,35	65,11	97,98%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.213.869.780,50	42.836.936.851,15	90,73
Prevalensi Stunting	5,80	1,96	33,8%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	125.063.000,00	122.624.503,00	98,05
Indeks Pembangunan Gender	82,00	80,97	98,74%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	621.853.750,00	619.121.073,00	99,56
Kabupaten Layak Anak	Inisiasi	n.a	n.a	Program Pemenuhan Hak Anak	325.140.100,00	314.118.100,00	96,61

BAB IV

PENUTUP

Dari gambaran capaian kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sudah signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 18 indikator sasaran atau 78,26% bermakna Sangat Tinggi, 2 indikator sasaran atau 8,70% dengan capaian Tinggi, 1 indikator sasaran atau 4,35% dengan capaian Sangat Rendah, dan 2 indikator atau 8,70% belum diketahui hasilnya.

Permasalahan dan solusi :

1. Belum adanya rilis data terbaru dari instansi yang berwenang atas capaian indikator kinerja sehingga masih menggunakan capaian indikator pada tahun sebelumnya;
2. Beberapa kegiatan yang menjadi target pemerintah daerah belum terlaksana karena adanya penghematan anggaran di tahun 2024;

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan baik. Untuk itu, kami akan terus meningkatkan hasil kinerja melalui kerja keras dengan bersinergi, berinovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bolaang Uki, 14 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

rHi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si

